

## **BAB V**

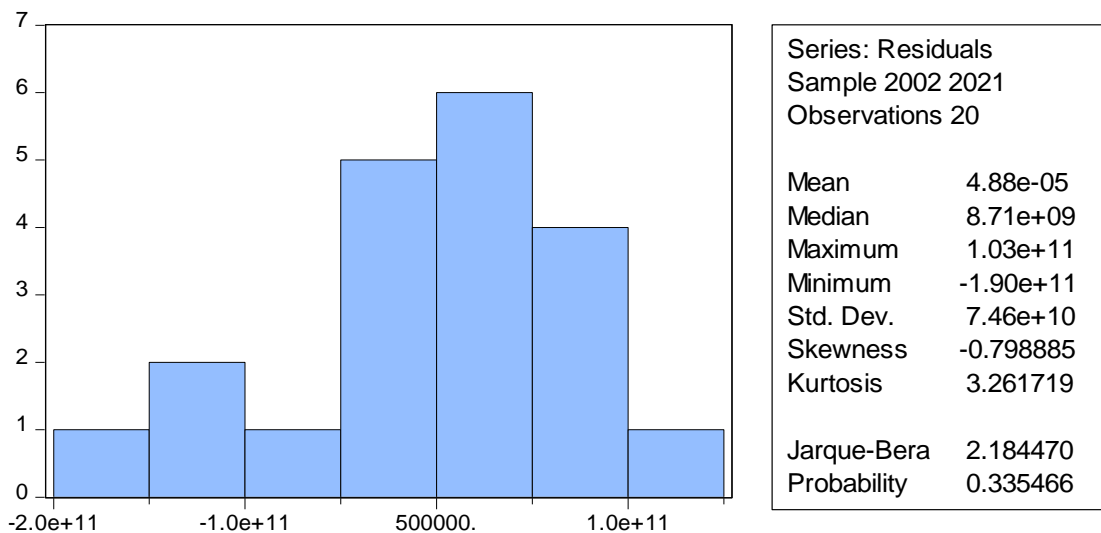
### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik merupakan pengujian yang bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa tidak terjadi bias dalam penelitian (Santoso, 2014). Model yang diperoleh dalam hasil pengujian data diharuskan data dapat memenuhi prasyarat pada uji asumsi klasik guna memperoleh hasil yang “blue (best linier unbiased estimator)” yakni “best fit model” . Adapun Metode uji asumsi klasik yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **5.1.1. Uji Normalitas**

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residu dalam sebuah model regresi telah berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (Best Linier Unbias Estimator) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi. Uji normalitas menggunakan program eviews normalitas sebuah data dapat diketahui dengan membandingkan nilai Jarque-Bera (JB) dan nilai Chi-Square tabel. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :  $H_0 : \beta_1 = 0$  {data berdistribusi normal} dan  $H_0 : \beta_2 \neq 0$  {data tidak berdistribusi normal}. Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut : 1) Jika nilai Probability  $> 0,05$  maka distribusi adalah normal; dan 2) Jika nilai Probability  $< 0,05$  maka distribusi adalah tidak normal.



Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0.335466  $> 0.05$ , yang berarti hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data variabel dependen dan independen yang digunakan terdistribusi normal

### 5.1.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Dengan demikian, uji autokorelasi hanya dapat dilakukan pada data time series (runtut waktu), sebab yang dimaksud dengan autokorelasi adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu yang sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Penentuan untuk melihat ada tidaknya korelasi adalah apabila nilai DW terletak diantara nilai  $-2$  dan  $2$  maka dinyatakan tidak ada autokorelasi (Santoso, 2014:192).

F-statistic	1.622447	Prob. F(2,11)	0.2413
Obs*R-squared	4.555869	Prob. Chi-Square(2)	0.1025

Dalam uji autokorelasi untuk mengetahui terdapat atau tidak mengandung autokorelasi, dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika hasil uji dengan nilai signifikansi  $\text{Prob. Chi-Square}(2) < 0.05$ , maka data penelitian mengandung autokorelasi
2. Jika hasil uji dengan nilai signifikansi  $\text{Prob. Chi-Square}(2) > 0.05$ , maka data penelitian tidak mengandung autokorelasi

Hasil dari tabel pengujian di atas menunjukkan nilai  $\text{Prob. Chi-Square}(2)$  sebesar  $0.1025 > 0.05$  maka dapat dinyatakan tidak terjadi masalah autokorelasi

### **5.1.3. Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini menggunakan uji Park dimana variabel-variabel bebas diregresikan terhadap nilai logaritma dari kuadrat residual (Ghozali, 2011:141). Ketika koefisien signifikansi  $> \alpha$  yang ditetapkan, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan dari data cross section mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili

berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser yakni meregresikan nilai mutlaknya. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :  $H_0 : \beta_1 = 0$  {tidak ada masalah heteroskedastisitas} dan  $H_0 : \beta_2 \neq 0$  {ada masalah heteroskedastisitas} Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Glejser adalah sebagai berikut : 1) Jika nilai Probability > 0,05 maka  $H_0$  ditolak, artinya ada masalah heteroskedastisitas; dan 2) Jika nilai Probability < 0,05 maka  $H_0$  diterima, artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas.

F-statistic	1.164820	Prob. F(6,13)	0.3816
Obs*R-squared	6.992793	Prob. Chi-Square(6)	0.3215
Scaled explained SS	3.341074	Prob. Chi-Square(6)	0.7650

Syarat dalam pengujian uji heterokedastisitas adalah sebagai berikut: 1) Jika hasil uji dengan nilai signifikansi Prob. Chi-Square(6) < 0.05, maka data penelitian mengandung autokorelasi; dan 2) Jika hasil uji dengan nilai signifikansi Prob. Chi-Square(6) > 0.05, maka data penelitian tidak mengandung autokorelasi.

Dari hasil uji Heterokedastisitas dengan metode Breusch-Pagan-Godfrey dapat diketahui bahwa nilai Obs\*R-square prob. Chi-Square (6) sebesar 0.3216 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah terhadap uji heterokedestisitas.

#### 5.1.4. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinearitas. Uji Multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016:110). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam regresi adalah sebagai berikut : 1) Jika nilai koefisien kolerasi ( $R^2$ ) > 0,80, maka data tersebut terjadi multikolinearitas; 2) Jika nilai koefisien kolerasi ( $R^2$ ) < 0,80, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Uji multikolinearitas merupakan pengujian untuk melihat apakah pada model regresi terdapat korelasi antar variabel independennya (Ghozali, 2011:108). Mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dalam model regresi dapat dilihat melalui ukuran nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai yang menunjukkan tidak terjadinya multikolonieritas adalah nilai Tolerance  $\geq 0,1$  dan nilai VIF  $\leq 10$ .

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5.72E+23	1405.953	NA
PAD	0.026366	79.03581	19.73068
DAU	0.092956	173.7638	43.43046
DAK	0.024026	16.78485	11.44001
JP	8.76E+10	2112.839	32.33691
KJB	4.79E+18	21.83092	1.324055
PE	3.52E+20	30.46685	3.302668

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). 1) Apabila nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) > 10 dapat dipastikan tidak terjadi multikolinearitas; dan 2) Apabila nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 maka dapat dipastikan terjadi multikolinearitas.

- a. VIF PAD = 19.73068 > 10 dapat dipastikan tidak terjadi multikolinearitas.
- b. VIF DAU = 43.43046 > 10 dapat dipastikan tidak terjadi multikolinearitas.
- c. VIF DAK = 11.44001 > 10 dapat dipastikan tidak terjadi multikolinearitas.
- d. VIF Jumlah Penduduk = 32.33691 > 10 dapat dipastikan tidak terjadi multikolinearitas.
- e. VIF Kondisi Jalan Baik = 1.324055 < 10 maka dapat dipastikan terjadi multikolinearitas.
- f. VIF Pertumbuhan Ekonomi = 3.302668 < 10 maka dapat dipastikan terjadi multikolinearitas.

#### **5.1.5. Linearitas**

Uji linearitas dapat digunakan untuk melihat apakah model yang telah dibangun memiliki hubungan linear atau tidak. Tes uji linearitas ini, jarang digunakan sebab menurut beberapa studi uji ini biasanya dibangun atas dasar studi teoritis bahwa ada hubungan antara variabel independen dengan dependen yang bersifat linier. Hubungan antara variabel tersebut, secara teoritis tidak memiliki hubungan linier akan tetapi tidak dapat dianalisis dengan menggunakan regresi linier, contohnya adalah seperti masalah elastisitas.

Apabila ada hubungan di antara dua variabel yang belum diketahui apakah hubungan tersebut linier atau tidak, maka uji linieritas pun tidak dapat digunakan

untuk memberikan adjustment atau penyesuaian bahwa hubungan tersebut memiliki linier atau tidak. Uji linearitas dapat digunakan untuk mengkonfirmasi apakah ada sifat linier antara dua variabel yang diidentifikasi pada suatu teori sesuai dengan hasil dari pengamatan penelitian. Tes linearitas pun dapat digunakan dengan melakukan uji durbin watson serta tes pengali lagrange atau tes ramsey.

	Value	df	Probability
t-statistic	1.235311	12	0.2404
F-statistic	1.525993	(1, 12)	0.2404
Likelihood ratio	2.394133	1	0.1218

Syarat dari uji linearitas adalah: 1) Jika nilai probability F-statistic probability  $< 0.05$  maka berkesimpulan asumsi linearitas tidak terpenuhi; dan 2) Jika nilai probability F-statistic probability  $> 0.05$  maka berkesimpulan asumsi uji linearitas sudah terpenuhi.

Dengan hasil nilai F-statistic probabilitly  $0.2404 > 0.05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi linearitas yang artinya tidak terjadi masalah linearitas.

## 5.2 Faktor yang Mempengaruhi realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) jumlah penduduk dan kondisi jalan terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi digunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur dilakukan pada variabel eksogenus yang mempengaruhi secara signifikan kepada variabel endegonus. Analisis jalur dilakukan guna mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. *Path Analysis*

digunakan apabila secara teori diyakin berhadapan dengan masalah sebab akibat (Muhidin dan Abdurahman, 2007).

Sebelum dibuat kesimpulan mengenai koefisien jalur, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian mengenai keberartian koefisien jalur, baik secara simultan maupun parsial. Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_2$ ), Dana Alokasi Khusus (DAK) ( $X_3$ ), Jumlah Penduduk ( $X_4$ ) dan Kondisi Jalan ( $X_5$ ) secara simultan terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi adalah uji F (*F-test*).

Untuk menguji keberartian koefisien jalur secara simultan, maka pasangan hipotesis dirumuskan adalah :  $H_0 : P_{YX1} = P_{YX2} = P_{YX3} = P_{YX4} = P_{YX5} = 0$  dan  $H_1$  sekurang-kurangnya ada sebuah  $P_{YXi} \neq 0$ . Hasil analisis uji F diperoleh nilai  $F_{hitung} = 29,372$  dengan  $signifikan = 0,000$  yang berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, artinya sekurang-kurangnya terdapat satu nilai koefisien jalur yang berarti (signifikan). Hasil ini menunjukkan bahwa faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_2$ ), Dana Alokasi Khusus (DAK) ( $X_3$ ), Jumlah Penduduk ( $X_4$ ) dan Kondisi Jalan ( $X_5$ ) secara simultan mempengaruhi realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi. Oleh karena hasil pengujian secara simultan (uji F) adalah signifikan, maka selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial (uji t). Uji t dilakukan untuk melihat secara parsial pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_2$ ), Dana Alokasi Khusus (DAK) ( $X_3$ ), Jumlah Penduduk ( $X_4$ ) dan Kondisi Jalan ( $X_5$ ) secara parsial terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi.



Berdasarkan uji t diperoleh hasil untuk kelima jalur yang ada ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  dan  $X_5$ ), ternyata 3 (tiga) jalur yang tidak signifikan yaitu koefisien jalur untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $X_1$ ), Jumlah Penduduk ( $X_4$ ) dan Kondisi Jalan ( $X_5$ ), sedangkan 2 (dua) jalur lainnya yaitu koefisien jalur Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_2$ ) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ( $X_3$ ) adalah signifikan. Temuan ini sedikit sejalan dengan penelitian Yuliantoni & Arza (2021) tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019 menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

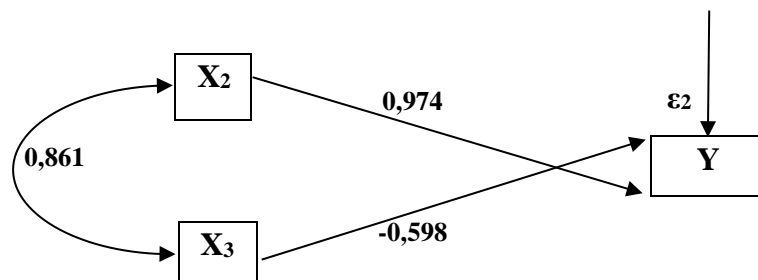
Adanya koefisien jalur yang tidak signifikan berarti menunjukkan bahwa koefisien jalur tersebut tidak berarti. Dengan demikian koefisien jalur yang tidak signifikan tersebut harus dihilangkan, sehingga terjadi perubahan struktur jalur yaitu dari bentuk struktur jalur awal (melibatkan lima variabel independen =  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  dan  $X_5$ ) menjadi bentuk struktur jalur baru yang hanya melibatkan 2 (dua) variabel independen yang signifikan ( $X_2$  dan  $X_3$ ).

Untuk struktur jalur yang baru tersebut, kembali dihitung koefisien jalurnya yaitu pengujian koefisien jalur secara simultan dengan uji F. Pasangan hipotesisnya dirumuskan adalah :  $H_0 : P_{YX_2} = P_{YX_3} = 0$  dan  $H_1$  sekurang-kurangnya ada sebuah  $P_{Y1X_i} \neq 0$ . Hasil analisis uji F diperoleh nilai  $F_{hitung} = 84,465$  dengan significant = 0,000 yang berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, artinya sekurang-kurangnya terdapat satu nilai koefisien jalur yang berarti (signifikan).

Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_2$ ) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi.

Oleh karena hasil uji F adalah signifikan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji t (*t-test*). Uji t dilakukan untuk mengetahui secara parsial pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_2$ ) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ( $X_3$ ) terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi. Untuk menguji keberartian koefisien jalur secara parsial maka pasangan hipotesis dirumuskan, yaitu :  $H_0 : P_{YX_i} = 0$  dan  $H_1 : P_{YX_i} \neq 0$ . Hasil uji t untuk Y diperoleh  $P_{YX_2}$  dan  $P_{YX_3}$  adalah signifikan. Hal ini berarti bahwa faktor Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi.

Model analisis jalur (*path analysis*) untuk realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi dapat digambarkan dalam diagram jalur (*path diagram*) yaitu:



Gambar 5.1. Diagram Jalur Variabel  $X_2$  dan  $X_3$  Terhadap Y

Keterangan :

Y = Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

$X_2$  = Dana Alokasi Umum (DAU)

$X_3$  = Dana Alokasi Khusus (DAK)

$\rho_{YiX_{2-3}}$  = Koefisien Jalur

$\varepsilon$  = Variabel residu

Tabel 5.1. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Variabel Endogen	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak langsung Melalui Variabel		Pengaruh Total
		Dana Alokasi Umum (DAU) (X <sub>2</sub> )	Dana Alokasi Khusus (DAK) (X <sub>3</sub> )	
Dana Alokasi Umum (DAU) (X <sub>2</sub> )	94,87	0,000	(50,15)	<b>44,72</b>
Dana Alokasi Khusus (DAK) (X <sub>3</sub> )	35,76	(50,15)	0,000	<b>(14,39)</b>
Pengaruh Total X <sub>2</sub> -X <sub>3</sub> Terhadap Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi				<b>59,11</b>

### 5.2.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

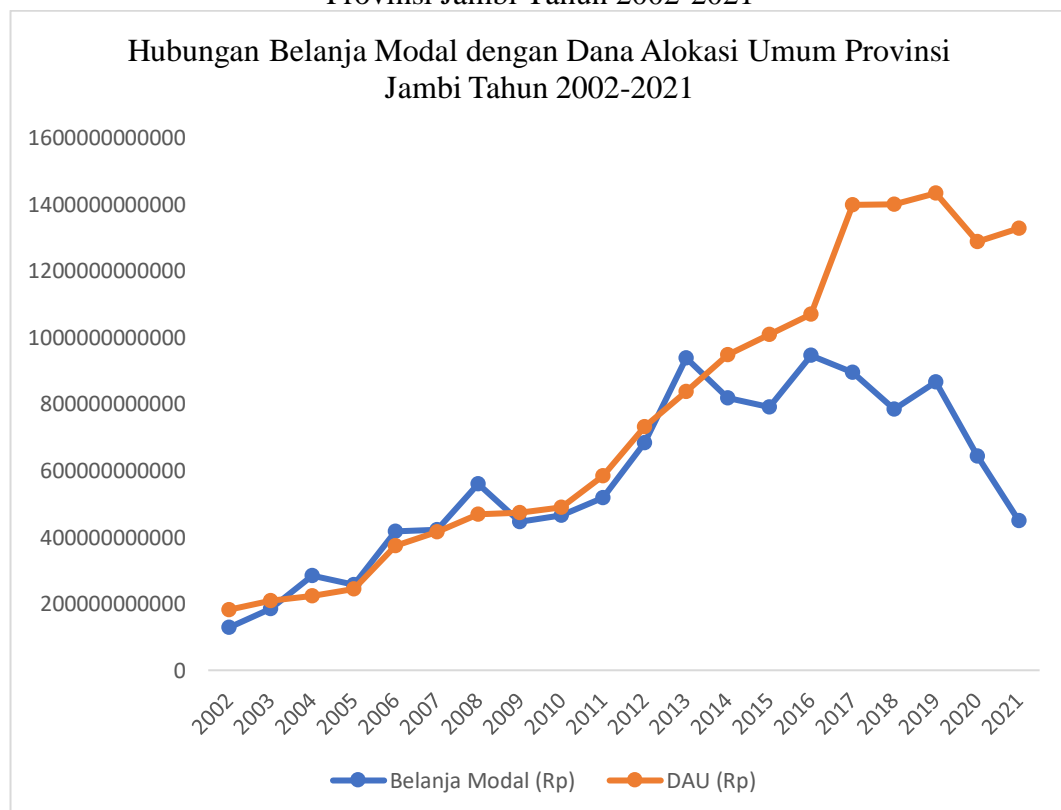
Pada periode Tahun 2002-2021, terjadi perkembangan realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi adalah berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari Rp. 128.405.414.000,- tahun 2002 menjadi Rp. 449.690.683.610,- pada tahun 2021 atau rata-rata tumbuh sebesar 9,94 % per tahun. Realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi yang terbesar terjadi pada tahun 2016 (Rp. 945.539.000.000,-), sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2002 (Rp. 128.405.414.000,-).

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi selama periode tahun 2002-2021 tertinggi terjadi pada tahun 2006 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 62,21 %. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021 realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi tumbuh negatif yang paling besar yaitu masing-masing sebesar -25,83% dan

-30,03%. Diketahui terjadi penurunan realisasi anggaran yang cukup signifikan yang terjadi mulai dari bulan Maret sampai dengan Mei 2020, khususnya pada jenis belanja modal. Banyak kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah dijadwalkan selama 1 tahun ke depan terpaksa harus ditunda atau dibatalkan dengan pertimbangan keamanan dan kesehatan.

Berdasarkan Grafik berikut, terlihat hubungan yang cukup erat dan signifikan antara realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi dengan Dana Alokasi Umum Provinsi Jambi selama periode tahun 2002-2021 dengan nilai *Pearson Correlation* sebesar 0,790 dengan *signification (2-tailed)* sebesar 0,0000.

Grafik 5.1. Hubungan Belanja Modal dengan Dana Alokasi Umum Provinsi Jambi Tahun 2002-2021



Hasil analisis uji t pada faktor Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh hasil significant sebesar 0,000 yang berarti signifikan (signifikansinya lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ ). Hasil ini memiliki makna bahwa faktor Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jambi berpengaruh nyata terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Yuliantoni & Arza (2021) yang menyimpulkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia selama periode 2015-2019. Berdasarkan penelitian empiris yang telah dilakukan oleh Oktora dan Pontoh (2013) mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, dan begitu pula penelitian dan Yovita (2011) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah.

Selanjutnya dianalisis dengan model *path analysis* untuk memperoleh besarnya pengaruh faktor Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jambi terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi, seperti tersaji pada Tabel berikut ini.

Tabel 5.2. Hasil Analisis Model *Path Analysis* Faktor Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

No	Pengaruh Variabel	Besar Pengaruh (%)
1	Pengaruh Langsung Faktor Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_2$ )	94,87
2	Pengaruh Tidak Langsung melalui Faktor Dana Alokasi Khusus (DAK) ( $X_3$ )	(50,15)
Pengaruh Total Faktor Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_2$ ) Terhadap Y		<b>44,72</b>

Keterangan :

Y = Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

X<sub>2</sub> = Faktor Dana Alokasi Umum (DAU)

X<sub>3</sub> = Faktor Dana Alokasi Khusus (DAK)

Hasil perhitungan dari model *path analysis* diperoleh nilai untuk pengaruh faktor Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jambi terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi sebesar 44,72 %. Artinya bahwa realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi ditentukan sebesar 44,72 % dari faktor Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jambi.

Seberapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung faktor Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi terlihat pada Tabel 5.2. Faktor Dana Alokasi Umum (DAU) memberi pengaruh langsung (*direct causal effects*) terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi sebesar 94,87 %. Adapun pengaruh tidak langsung (*indirect causal effects*) faktor Dana Alokasi Umum (DAU) melalui faktor Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi adalah (50,15 %). Maka diperoleh *total causal effects* atau pengaruh total (langsung dan tak langsung) faktor Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi sebesar 44,72 %.

Koefisien jalur untuk faktor Dana Alokasi Umum (DAU) bertanda positif, hal ini berarti bahwa hubungan kausal tersebut adalah searah. Kenyataan ini menginformasikan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pemerintah daerah Provinsi Jambi maka semakin besar realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi. Sebaliknya semakin kecil Alokasi Umum

(DAU) untuk pemerintah daerah Provinsi Jambi maka semakin kecil realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah, membantu pembangunan daerah, untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Hampir sama halnya dengan belanja modal ialah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan/mesin, membangun infrastruktur dan harta tetap lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki perananan penting, karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Dalam hal ini dana alokasi umum dan belanja modal bersama-sama dapat dipergunakan untuk penyediaan layanan kepada masyarakat/publik. Artinya dana alokasi umum dan belanja modal memiliki pengaruh, karena jika semakin tinggi dana alokasi umum yang ditransfer dari pemerintah pusat akan membantu meningkatkan belanja modal di daerah, hal ini didukung oleh penelitian dari Oktorizal dkk (2022) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sejalan juga dengan penelitian Pratama (2021) hasil penelitiannya Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.

Berdasarkan pembahasan di atas, Dana Alokasi Umum terbukti mampu memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan realisasi belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan yang dimiliki Daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum DAU, yang berarti masih tingginya ketergantungan Daerah pada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan alokasi anggaran belanja modalnya (Nurcandra, 2015).

Di sisi lain, hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan alokasi Dana Alokasi Umum sebagai solusi dalam meratakan kemampuan keuangan Daerah yang berpengaruh pada meningkatnya kemampuan Daerah dalam merealisasikan belanja modalnya (Rajasa, 2011). Hasil ini juga menunjukkan hal yang bermakna positif dimana Dana Alokasi Umum telah dimanfaatkan untuk kepentingan belanja yang bersifat pembangunan seperti belanja modal, sehingga bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tidak hanya digunakan untuk keperluan yang bersifat operasional atau konsumtif saja, melainkan juga dimanfaatkan bagi penyediaan belanja pelayanan publik yang bersifat jangka panjang.

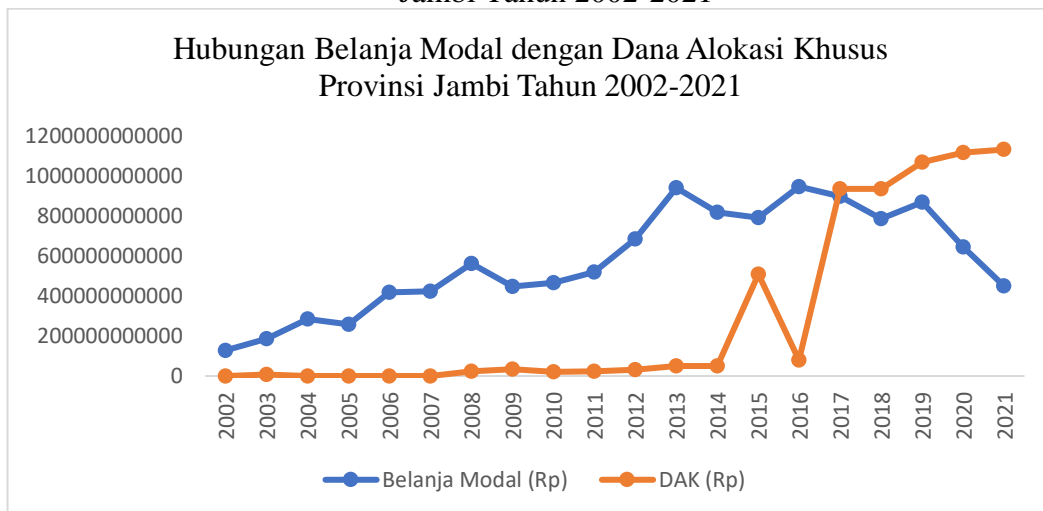
### **5.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal**

Terdapat hubungan yang kurang erat dan signifikan antara realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi dengan Dana Alokasi Khusus Provinsi Jambi selama periode tahun 2002-2021 dengan nilai Pearson Correlation sebesar 0,409 dengan signification (2-tailed) sebesar 0,073. Hasil analisis uji t pada faktor Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh hasil significant sebesar 0,000 yang berarti



signifikan (signifikansinya lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ ). Hasil ini memiliki makna bahwa faktor Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Jambi berpengaruh nyata terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi, seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 5.2. Hubungan Belanja Modal dengan Dana Alokasi Khusus Provinsi Jambi Tahun 2002-2021



Selanjutnya dianalisis dengan model *path analysis* untuk memperoleh besarnya pengaruh faktor Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Jambi terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi, seperti tersaji pada Tabel berikut ini.

Tabel 5.3. Hasil Analisis Model *Path Analysis* Faktor Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

No	Pengaruh Variabel	Besar Pengaruh (%)
1	Pengaruh Langsung Faktor Dana Alokasi Khusus (DAK) ( $X_3$ )	35,76
2	Pengaruh Tidak Langsung melalui Faktor Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_2$ )	(50,15)
Pengaruh Total Faktor Dana Alokasi Khusus (DAK) ( $X_3$ ) Terhadap Y		<b>(14,39)</b>

Keterangan :

Y = Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

X<sub>2</sub> = Faktor Dana Alokasi Umum (DAU)

X<sub>3</sub> = Faktor Dana Alokasi Khusus (DAK)

Hasil perhitungan dari model *path analysis* diperoleh nilai untuk pengaruh faktor Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Jambi terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi sebesar (14,39 %). Hasil ini memiliki artinya bahwa realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi ditentukan sebesar 14,39% dari faktor Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Jambi.

Seberapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung faktor Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Jambi terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi terlihat pada Tabel 5.3. Faktor Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Jambi memberi pengaruh langsung (*direct causal effects*) terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi sebesar 35,76 %. Adapun pengaruh tidak langsung (*indirect causal effects*) faktor Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Jambi melalui faktor Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jambi terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi adalah (50,15 %). Maka diperoleh *total causal effects* atau pengaruh total (langsung dan tak langsung) faktor Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Jambi terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi sebesar (14,39%).

Koefisien jalur untuk faktor Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Jambi bertanda negatif, hal ini berarti bahwa hubungan kausal tersebut adalah berlawanan arah. Kenyataan ini menginformasikan bahwa semakin besar Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemerintah daerah Provinsi Jambi maka semakin kecil realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi. Sebaliknya semakin kecil Alokasi

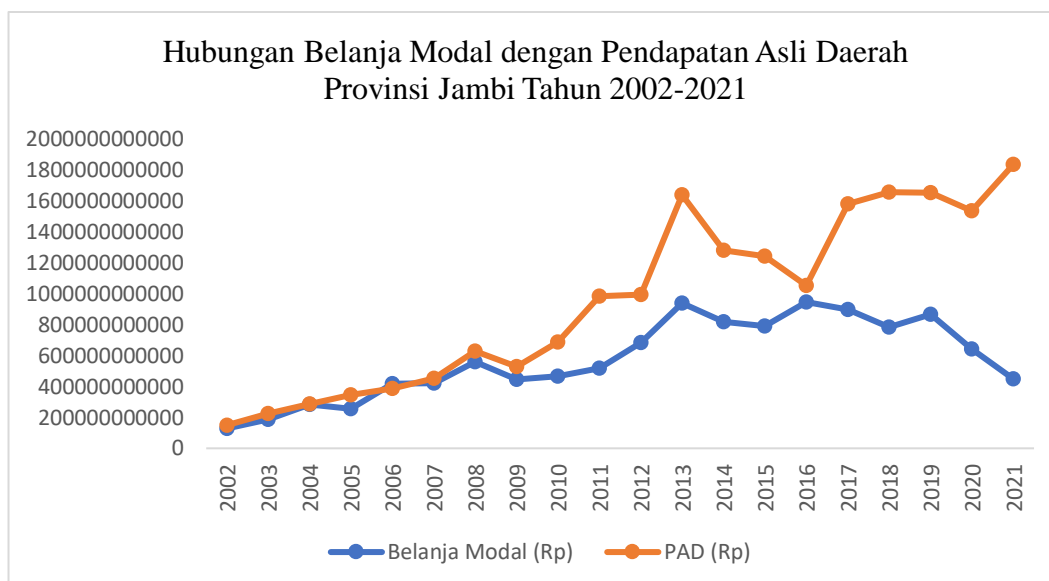
Khusus (DAK) untuk pemerintah daerah Provinsi Jambi maka semakin besar realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi.

Penelitian yang dilakukan Permatasari & Mildawati (2016) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi belanja modal. Sugiyanta (2016) juga membuktikan adanya pengaruh positif yang signifikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Daerah. Dari hasil tersebut menunjukkan *specific purpose grant* merupakan alat yang efektif bagi Pemerintah Pusat untuk menyelaraskan perbaikan infrastruktur di Provinsi Jambi dengan preferensi prioritas nasional yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan fungsi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memang sangat berkaitan dan lebih difokuskan untuk keperluan penyediaan infrastruktur di Provinsi Jambi.

### **5.2.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal**

Ada banyak upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program *intensifikasi* terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi pengelolaan PAD Provinsi Jambi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD dengan pertimbangan tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Grafik 5.3. Hubungan Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2002-2021



Berdasarkan Grafik berikut, terlihat hubungan yang cukup erat dan signifikan antara realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi selama periode tahun 2002-2021 dengan nilai *Pearson Correlation* sebesar 0,795 dengan *signification (2-tailed)* sebesar 0,073. Terdapat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan belanja modal pemerintah daerah, namun tidak semua daerah dengan pendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula (Kartikasari & Rohman, 2019).

Hasil analisis uji t pada faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi diperoleh hasil significant sebesar 0,515 yang berarti tidak signifikan (signifikansinya lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ ). Hasil ini memiliki makna bahwa faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi tidak berpengaruh nyata terhadap realisasi belanja modal

pemerintah daerah Provinsi Jambi. Temuan penelitian memberi penjelasan bahwa besar atau kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi tidak menyebabkan meningkat atau menurunnya realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi.

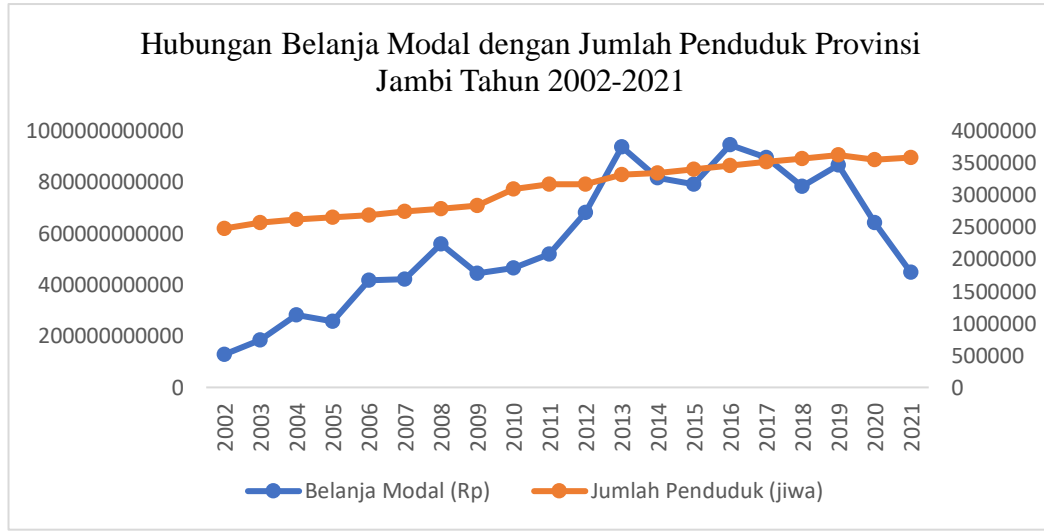
Kondisi ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai pemerintah daerah Provinsi Jambi. Belanja Pegawai Provinsi Jambi dalam 20 tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan, mulai dari Rp.87.773.259.000,- pada tahun 2002 dan meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp.5.109.985.160.000,-. secara rata-rata Belanja Pegawai Provinsi Jambi selama dalam 20 tahun terakhir tumbuh cukup besar yaitu sebesar 48,34 % per tahun. Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Nurlis (2016) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai belanja modal.

#### **5.2.4. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal**

Jumlah penduduk Provinsi Jambi dalam 20 tahun terakhir atau periode tahun 2002-2021 mengalami perkembangan dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Provinsi Jambi berjumlah 3.585.100 jiwa jauh meningkat dibandingkan tahun 2002 yang hanya 2.479.469 jiwa. Namun, secara rata-rata jumlah penduduk Provinsi Jambi selama dalam 20 tahun terakhir tumbuh sebesar

1,98 % per tahun. Pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Jambi terbesar terjadi pada tahun 2010 (9,11%) dibandingkan tahun sebelumnya, secara detail tersaji Grafik berikut.

Grafik 5.4. Hubungan Belanja Modal dengan Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2002-2021



Grafik 5.4. menggambarkan hubungan yang cukup erat dan signifikan antara realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi selama periode tahun 2002-2021 dengan nilai *Pearson Correlation* sebesar 0,834 dengan *signification (2-tailed)* sebesar 0,0000. Hasil analisis uji t pada faktor jumlah penduduk Provinsi Jambi terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi diperoleh hasil significant sebesar 0,456 yang berarti tidak signifikan (signifikansinya lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ ). Hasil ini memiliki makna bahwa faktor jumlah penduduk Provinsi Jambi tidak berpengaruh nyata terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi. Temuan penelitian memberi penjelasan bahwa besar atau kecilnya jumlah penduduk Provinsi Jambi tidak menyebabkan meningkat atau menurunnya realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Ririn Wulandari (2013) yang menyatakan bahwa kepadatan penduduk secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal karena ketidakmerataan kepadatan penduduk dengan kapasitas fiskal daerahnya, sehingga pemerintah Provinsi harus memprioritaskan program mereka berdasarkan karakteristik wilayah mereka.

### 5.2.5. Pengaruh Kondisi Jalan Baik Terhadap Belanja Modal

Proporsi jalan dalam kondisi baik di Provinsi Jambi mengalami perkembangan dalam 20 tahun terakhir ini (tahun 2002 – 2021) yang cukup berfluktuatif, namun secara rata-rata menunjukkan perkembangannya mengalami kecenderungan penurunan sebagaimana terlihat pada Grafik 5.5. Penurunan proporsi jalan dalam kondisi baik di Provinsi Jambi tahun 2002 – 2021 terjadi karena jalan dalam kondisi baik tersebut menurun kondisinya dan masuk dalam kategori jalan sedang. Namun demikian jalan di Provinsi Jambi tersebut masih dalam kondisi mantap.

Grafik 5.5. Hubungan Belanja Modal dengan Kondisi Jalan Baik Provinsi Jambi Tahun 2002-2021



Gambaran hubungan antara realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi dengan kondisi jalan baik Provinsi Jambi selama periode tahun 2002-2021 adalah tidak erat dan tidak signifikan dengan nilai *Pearson Correlation* sebesar 0,229 dengan *signification (2-tailed)* sebesar 0,331. Hasil analisis uji t pada faktor kondisi jalan baik Provinsi Jambi terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi diperoleh hasil significant sebesar 0,862 yang berarti tidak signifikan (signifikansinya lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ ). Hasil ini memiliki makna bahwa faktor kondisi jalan baik Provinsi Jambi tidak berpengaruh nyata terhadap realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi. Temuan penelitian memberi penjelasan bahwa panjang atau pendeknya kondisi jalan baik Provinsi Jambi tidak menyebabkan meningkat atau menurunnya realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi.

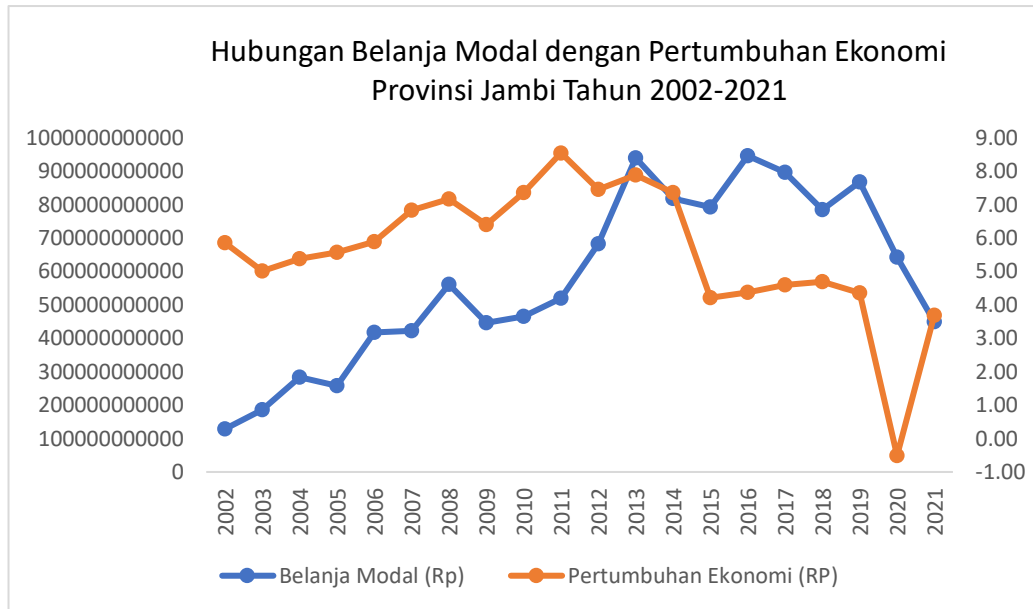
#### **5.2.6. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Gambaran hubungan antara realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode tahun 2002-2021 adalah tidak erat dan tidak signifikan dengan nilai *Pearson Correlation* sebesar -0,089 dengan *signification (2-tailed)* sebesar 0,701. Hasil analisis uji t pada faktor realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi diperoleh hasil significant sebesar 0,862 yang berarti tidak signifikan (signifikansinya lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ ). Hasil ini memiliki makna bahwa faktor realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.



Temuan penelitian memberi penjelasan bahwa naik atau turunnya realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jambi tidak menyebabkan meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Grafik 5.6. Hubungan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2002-2021



Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yaitu Schaltegger dan Torgler (2006) menemukan bahwa pada level wilayah dan lokal di negara Swiss, belanja pemerintah dari anggaran rutin memiliki pengaruh negatif, sedangkan belanja modal pemerintah tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pertumbuhan ekonomi. Devarajan, Swaroop, dan Zou (1996) melakukan penelitian terhadap 43 negara berkembang, dan mereka menemukan bahwa hanya belanja pemerintah belanja rutin yang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan. Sebaliknya, belanja infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, tidak berpengaruh signifikan, dan bahkan negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka berkesimpulan bahwa negara-negara berkembang menghabiskan terlalu banyak anggaran untuk belanja

modal dan tidak cukup dana tersedia untuk belanja rutin. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, tergantung pada kondisi tiap-tiap daerah.